

LAPORAN PELAKSAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SAMPAI DENGAN BULAN MEI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah. SWT yang telah melimpahkan anugrahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini dimaksud sebagai tolak ukur kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016. Laporan ini dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk kedepannya. Selain untuk acuan evaluasi, dengan adanya penyusunan laporan ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kelemahan dan kendala serta faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjung Selor, Juni 2017

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. Datuk Balam DM, S.Sos, M.Si
NIP.19590412 198101 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
BAB II GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	3
A. Sejarah SKPD	3
B. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah.....	4
B.1. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	4
B.2. Personil SKPD.....	23
B.3. Sarana dan Prasarana SKPD.....	24
C. Alokasi Anggaran SKPD.....	24
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT	
 DAERAH	42
A. Realisasi Program dan Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Permasalahan	49
B. Rencana Tindak Lanjut	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur	23
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.3	Perlengkapan Penunjang SKPD	24
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran APBD dan APBD Perubahan TA.206	24
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Satker 350002	27
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Perkebunan Satker 350037	27
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Perkebunan Satker 350036	28
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satker 350010	29
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Satker 350011	33
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan Satker 350034	34
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Tanaman Pangan Satker 350035	35
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Satker 350038	36
Tabel 2.13	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Satker 350039	37
Tabel 2.14	Alokasi Anggaran APBN Ditjen Hortikultura Satker 350044	38
Tabel 2.15	Alokasi Anggaran APBN Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Satker 350053	39
Tabel 2.16	Alokasi Anggaran APBN Badan Ketahanan Pangan Satker 355102...	39
Tabel 3.1	Realisasi Anggaran APBD dan APBD-P Perubahan TA.2016.....	43
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran APBN TA.2016.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian suatu pembangunan. Untuk mencapai tujuan – tujuan pembangunan yang diinginkan maka upaya – upaya pembangunan harus diarahkan kepada efisiensi, pemerataan dan berkelanjutan dalam memberi panduan kepada alokasi sumber daya. Berbagai alternatif diharapkan memberikan keadaan yang lebih baik dimasa depan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai strategis karena secara geopolitik merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara Malaysia, terutama Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Provinsi ini terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Kalimantan Utara perlu segera merumuskan pembangunan kedepan secara tepat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas masyarakat di dalamnya.

Salah satu sektor yang mempunyai peranan vital dalam ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah dalam sektor pelaksanaan keamanan dan ketertiban.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai bentuk dari suatu pertanggung jawaban secara akuntabilitas sekaligus amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan peraturan yang berkaitan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
- b. Mengetahui capaian kinerja program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara;

- c. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi program/kegiatan agar dapat melakukan perbaikan kedepannya;
- d. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Sejarah SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan ketertiban, keamanan dan pelaksanaan peraturan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur sehingga mempercepat kemajuan wilayah utara terutama wilayah – wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Atas dasar Undang – Undang No. 20 tersebut Pemerintah Kalimantan Utara dalam hal ini Gubernur Kalimantan Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan pada Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

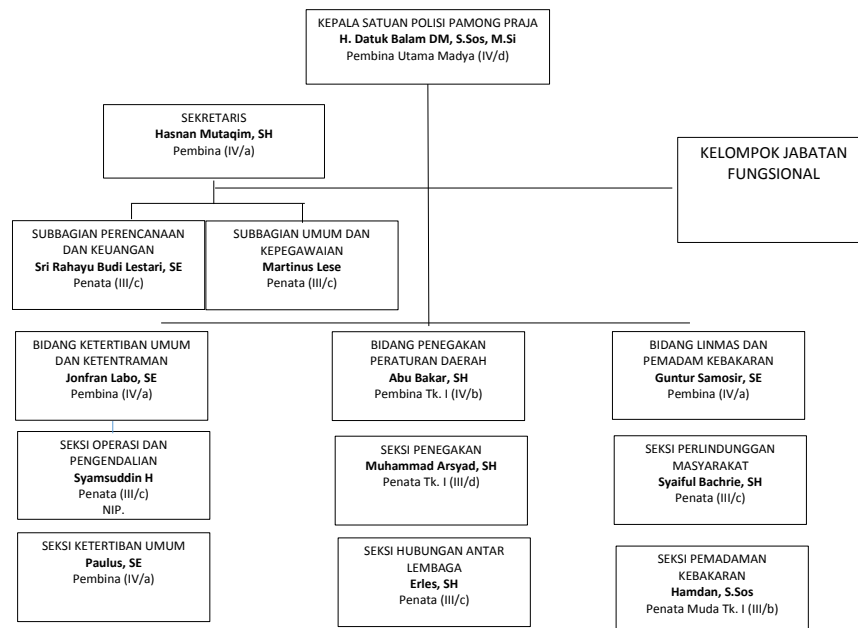
Sebagai Dinas teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketertiban, keamanan dan pelaksanaan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yang dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara juga berperan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan peraturan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mensinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

B. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah

B.1. Stuktur Organisasi dan Uraian Tugas

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas : 1 (satu) Eselon II yaitu Kepala Dinas; 4 (Empat) Eselon III yaitu 1 (Satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Bidang; 11 (Sebelas) Eselon IV yaitu 2 (Dua) Kepala Sub Bagian dan 6 (enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

B.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang terdiri dari :

- Eselon II : Sebanyak 1 (satu) Orang
- Eselon III : Sebanyak 4 (empat) Orang

- Eselon IV : Sebanyak 9 (Sembilan) Orang

Sejak dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, baik berupa recruitmen tenaga honorer sebagai tenaga bantuan polisi pamong praja, maupun ditempatkannya.

Tabel 2.2 : Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kaltara Berdasarkan Kualifikasi Golongan/Pangkat

No.	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNS	0
2.	II	PNS	3
3.	III	PNS	13
4.	IV	PNS	7
JUMLAH			23

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang yang terbagi menjadi 3 (tiga) orang pegawai golongan II, 13 (tiga belas) orang pegawai golongan III dan 7 (tujuh) orang pegawai golongan IV.

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masih terdapat kekurangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2.3 : Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	SD	PNS	0
2.	SMP	PNS	0
3.	SMA	PNS	3
4.	D I	PNS	0
5.	D III	PNS	1
6.	S 1	PNS	16
7.	S 2	PNS	3
JUMLAH			23

Dari data tabel diatas jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 menurut kualifikasi pendidikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : 3 (tiga) orang SMA; 1 (satu) orang D.III; 16 (enam belas) orang S.1; dan 3 (tiga) orang S.2.

Guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu adanya pengisian tenaga pasukan pengamanan dan penertiban, maka diperlukan perekrutan tenaga Bantuan Polisi (Banpol) dan Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 149 orang yang seluruhnya tenaga kontrak.

B.3. Sarana dan Prasarana SKPD

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berasal dari APBD.

Tabel 2.4 : Sarana dan Prasaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1.	Mesin Absensi	1	Baik
2.	Papan Nama Instansi	2	Baik
3.	Senter	50	Baik
4.	Lemari Kayu	15	Baik
5.	Kursi Besi/Metal	30	Baik
6.	Kursi Putar	20	Baik
7.	Tikar	2	Baik
8.	Sangkur	50	Baik
9.	Non Senjata Api Lain	50	Baik
10.	Global Positioning System	2	Baik
11.	Handy Talkie	50	Baik
12.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	5	Baik
13.	Organ/Elektone	1	Baik

14.	Alat Olah Raga Lainnya	21	Baik
15.	Filing Besi/Metal	15	Baik
16.	Lemari Kaca	15	Baik
17.	Meja Rapat	9	Baik
18.	Meja Kerja Pejabat	38	Baik
19.	Sepeda Motor	17	Baik
20.	Speed Boat	1	Baik
21.	Engineering Test Equipment	2	Baik
22.	Perkakas Kantor	1	Baik
23.	Papan Pengumuman	1	Baik
24.	Laser Pointer	10	Baik
25.	Tenda	1	Baik
26.	Tiang Bendera	1	Baik
27.	Loudspeaker	2	Baik
28.	Wireles	1	Baik
29.	Megaphone	2	Baik
30.	Microphone	2	Baik
31.	Proyektor + Attachment	1	Baik
32.	Audio Amplifier	2	Baik
33.	Microphone/Wireles Mic	4	Baik
34.	Microphone/Bomm Stand	2	Baik
35.	Microphone Table Stand	2	Baik
36.	Amplifier	1	Baik
37.	Jack CBR	4	Baik
38.	Mixer	1	Baik
39.	Kabel Listrik	1	Baik
40.	Layar	1	Baik
41.	Alar Peraga Keterampilan Lain	2	Baik
42.	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
43.	Berangkas	1	Baik

44.	PC. Unit	6	Baik
45.	Laptop	6	Baik
46.	Printer	7	Baik
47.	External	5	Baik
48.	Buku Ilmu Sosial Lainnya	1	Baik
49.	Station Wagon	2	Baik
50.	Mini Bus	1	Baik
51.	Truck + Attachment	2	Baik
52.	Perahu Karet	2	Baik
53.	Mesin Tempel	2	Baik

C. Alokasi Anggaran SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah.

Tabel 2.4 : Alokasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Administrasi Perkantoran	2.665.906.400
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.900.000
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.357.200.000
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.000.000
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	29.700.000
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	100.000.000
	10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	420.000.000
	11. Rapat – Rapat Koordinasi,	419.106.400

	Pembinaan dan Konsultasi di Dalam Daerah	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.130.990.000
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	860.000.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12.600.000
	3. Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	400.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	838.390.000
	5. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.689.141.385
	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	712.810.000
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	976.331.385
4.	Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.995.850.000
	1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	90.250.000
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	220.800.000
	3. Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah	438.000.000
	4. Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	2.141.800.000
	5. Pendataan Satpol PP	105.000.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.208.800.000
	1. Pelaksanaan, Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali)	405.000.000
	2. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.803.800.000
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	469.507.800
	1. Peningkatan Hubungan Kerjasama Antar Instansi Terkait Dalam Rangka Penanggulangan Bencana	158.257.800
	2. Patroli Bersama Dengan Satpol PP	311.250.000

	Kabupaten/Kota Pemberantasan Masyarakat	Terkait Penyakit	
7.	Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi		388.950.000
	1. Pengawasan di Lintas Batas Negara		246.250.000
	2. Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah		142.700.000
TOTAL			13.549.145.585

Dari data diatas dapat dilihat untuk anggaran APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 13.549.145.585.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Realisasi Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 Program dengan 29 Kegiatan. Untuk tahun anggaran 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 13.549.145.585.

Capaian realisasi anggaran APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2017

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Fisik	Keuangan	(%)	
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara					
	Belanja Tidak Langsung	4.066.919.855	25,61	1.041.374.663	25,61	3.025.545.192
	Belanja Langsung	13.549.145.585	21,91	2.721.176.950	20,08	10.827.968.635
2.	Program Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	2.665.904.400	29,07	774.849.695	29,07	1.891.056.705
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.130.990.000	37,31	477.642.614	22,41	1.653.347.386
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.689.141.385	3,96	66.961.221	3,96	1.622.180.164

5.	Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.995.850.000	14,32	273.641.600	9,13	2.722.208.400
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban	3.208.800.000	31,20	1.001.031.820	31,20	2.207.768.180
7.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	469.507.800	42,78	127.050.000	27,06	342.457.800
8.	Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	388.950.000	2,21	-	-	-
TOTAL		17.616.065.440	22,76	3.762.551.613	21,36	13.853.513.827

Dari data diatas didapatkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.616.065.440 yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.066.919.855 dengan realisasi sampai dengan bulan mei sebesar Rp. 1.041.374.663 atau sebesar 25,61 %. Sedangkan untuk belanja langsung anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 13.549.145.585 dengan realisasi sampai dengan bulan mei sebesar Rp. 2.721.176.950 atau sebesar 20,08 %.

B. Akubntablitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Realisasi Kegiatan Sampai dengan Bulan Mei Tahu 2017

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	Prosentase
------------------	----------------	--------------------	------------

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	.2.995.850.000	273.641.600	9,13
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP	90.250.000	0	0
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	220.800.000	26.930.000	12,20
Kajian Akademis Terkait Usulan Rancangan Produk Hukum Daerah	438.000.000	40.181.600	9,17
Pengawasan dan Pengamanan Aset Pemda	2.141.800.000	184.390.000	8,61
Pendataan Satpol PP	105.000.000	22.140.000	21,09
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.208.800.000	1.001.031.820	31,20
Pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali)	405.000.000	44.981.820	11,11
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Lingkungan	2.803.800.000	956.050.000	34,10
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	469.507.800	127.050.000	27,06
Peningkatan Hubungan Kerja Sama Antar Instansi Dalam Rangka Penanggulangan Bencana	158.257.800	0	0
Patroli Bersama Dengan Satpol PP Kab/Kota Terkait Pemberantasan Penyakit Masyarakat	311.250.000	127.050.000	40,82
Program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi	388.950.000	0	0
Pengawasan Dilintas Batas Negara	246.250.000	0	0
Sosialisasi Kepada Keloompok Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah	142.700.000		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan bulan mei tahun 2017, untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pada program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan pagu anggaran Rp. 3.208.800.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.001.031.820 atau sebesar 31,20 %. Sedangkan untuk realisasi terendah pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pada program Pemahaman Tertib Hukum dan Regulasi dengan anggaran sebesar Rp. 388.950.000 namun belum dapat dijalankan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Dalam kerangka penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara memperhatikan keterkaitan dengan rencana strategis sebagai arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2017. Namun, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada program dan kegiatan tentu menemui kendala dan permasalahan.

A. Permasalahan

Permasalahan yang dijumpai pada masing – masing bagian terkait dengan penyerapan anggaran pada dasarnya hampir sama meskipun pada setiap bagian memiliki permasalahan tersendiri, akan tetapi secara garis besar permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur terkait kegiatan pengadaan, pengelolaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dapat menghambat realisasi serapan anggaran;
2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terjadwal dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat maksimal saat melakukan penyerapan anggaran;
3. Kurangnya pengetahuan aparatur dalam merencanakan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan tidak terencana dengan baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berkenaan dengan permasalahan – permasalahan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan beberapa alternatif penyelesaian masalah antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap aparatur yang berhubungan langsung dengan kegiatan teknis;
2. Melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dapat terjadwal dengan baik;
3. Diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan sehingga untuk kedepan dapat lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan.

4. Mensinergikan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.




Rencana tindak lanjut ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk kedepan, sehingga mampu mencapai tujuan dan cita – cita Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut serta membangun Provinsi Kalimantan Utara.

**DOKUMENTASI PELAKSAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN
MEI 2017
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA**




No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
1.	Pelatihan Pejabat di Lingkup Pemerintah Prov. Kalimantan Utara Pada Tanggal 12 Januari 2017.		Foto Kasat Satpol PP Prov. Kaltara pada saat menghadiri pelatihan pejabat di lingkup Pemerintah Prov. Kalimantan Utara.
2.	Kegiatan Bimbingan Teknis Deteksi Dini bagi Satpol PP dalam Upaya Mendukung Deradikalisme.		Foto bersama Kasat Pol PP Prov. Kalimantan Utara dengan Kasat Pol PP seluruh Indonesia.
			Foto bersama Kasat Pol PP Prov. Kalimantan Utara dengan Kasat Pol PP seluruh Indonesia.



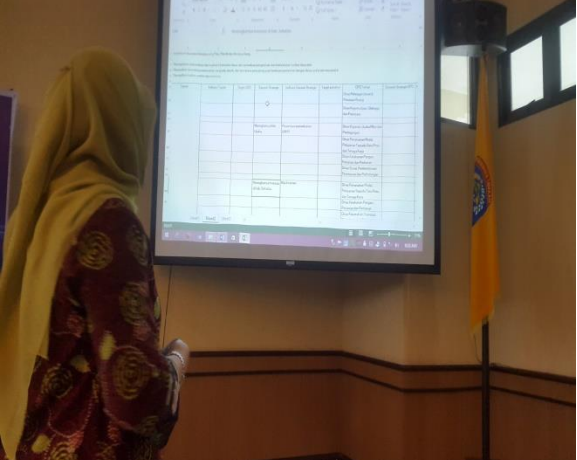
3.	Penertiban kendaraan Dinas oleh Satpol PP Prov. Kalimantan Utara		Pelaksanaan penertiban kendaraan dinas oleh Satpol Pp Prov. Kalimantan Utara
			Beberapa kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Utara yang terkena penertiban di pelabuhan speed boat.
4.	Konsultasi pembuatan website Satpol PP pada tanggal 14 Maret 2017 di Kota Malang		Konsultasi perihal pembuatan website Satpol PP Prov. Kalimantan Utara dengan CV. Khasanah Konsultama.

			Pada saat foto bersama dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara dengan CV. Khasanah Konsultama di Kota Malang.
5.	Rapat koordinasi terkait penyelenggaraan razia penyakit masyarakat di Kab. Malinau dan KTT.		Pihak – pihak terkait sedang melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan razia penyakit masyarakat di Kab. Malinau
			Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan razia penyakit masyarakat di Kab. Malinau

			Razia gabungan terkait penyakit masyarakat di Kab. Malinau dan Kab. KTT salah satunya terkait minuman berakohol yang illegal di perjual belikan.
			Selain minuman illegal, dalam razia gabungan ini kamar – kamar kosan maupun hotel juga termasuk dalam razia penyakit masyarakat.
			Beberapa orang yang tertangkap pada saat razia gabungan penyakit masyarakat di Kab. Malinau

			Hasil razia gabungan terkait penyakit masyarakat di Kab. Malinau.
			Persiapan pelaksanaan razia gabungan di Kab. Tana Tidung.
			Salah satu hasil razia gabungan terkait penyakit masyarakat dengan target tempat hiburan malam di Kab. Tana Tidung.

			Salah satu hasil razia gabungan terkait penyakit masyarakat dengan target tempat hiburan malam di Kab. Tana Tidung.
			Salah satu hasil razia gabungan penyakit masyarakat di Kab. Tana Tidung termasuk minuman keras yang diperjual belikan secara illegal.
			Salah satu hasil razia gabungan penyakit masyarakat di Kab. Tana Tidung termasuk minuman keras yang diperjual belikan secara illegal.




			Salah satu lokasi yang menjual minuman keras ilegal yang di razia di Kab. Tana Tidung.
6.	Pelaksanaan kegiatan pembekalan SAKIP pada tanggal 22 – 23 Maret 2017 di Kota Tarakan.		Penyampaian materi oleh narasumber dari Kemenpan-RB mengenai SAKIP Prov. Kalimantan Utara.
			Pada saat pelaksanaan kegiatan pembekalan SAKIP ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan pada saat pelaksanaan materi.

7.	Rapat evaluasi anggota Bantuan Polisi (Banpol) Satpol PP Prov. Kalimantan Utara pada Tanggal 27 Maret 2017		Penyampaian evaluasi terkait kegiatan anggota Banpol Satpol PP oleh Sekretaris dan Kabid Trantibum. Evaluasi ini dilakukan setiap triwulan
		 06-04-17 08:42	Instruksi yang disampaikan oleh Kabid Trantibum dalam evaluasi kegiatan anggota Banpol Satpol PP Prov. Kalimantan Utara.
8.	Pengamanan Demo mahasiswa di depan kantor Gubernur Prov. Kalimantan Utara		Foto pada saat pengamanan di depan kantor Gubernur Prov. Kalimantan Utara.

			Penjagaab kantor Gubernur Kalimantan Utara terkait pelaksanaan demo mahasiswa
			Persiapan pengamanan dalam rangka demo mahasiswa di kantor Gubernur Kalimantan Utara.
9.	Rapat Koordinasi terkait razian ASN di Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 30 Maret 2017		Penyampaian instruksi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam rapat koordinasi terkait razian ASN lingkup Prov. Kalimantan Utara

			Instansi – instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan razian ASN lingkup Prov. Kalimantan Utara.
10.	Rapat Koordinasi dengan PPTK, PPK, KPA, PA terkait penyusunan anggaran APBD Tahun 2018.		Rapat Kepala Satuan Satpol PP terkait penyusunan anggaran APBD Tahun 2018
			Dalam rapat koordinasi ini beberapa hal dibahas bersama terkait program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

11.	Pegawalan dan Pengamanan rombongan Gubernur Kalimantan Utara dalam kegiatan Pro Sehat di Kab. Malinau		Pengawalan Gubernur Kalimantan Utara melalui jalur darat dalam rangka mengikuti kegiatan launching Pro Sehat di Kab. Malinau.
			Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara dengan anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara terkait kegiatan Pro Sehat di Kab. Malinau.
			Pelaksanaan senam masal dalam rangka launching Pro Sehat di Kab. Malinau.

			<p>Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara bersama anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara dalam rangka senam masal Pro Sehat di Kab. Malinau.</p>
			<p>Pengamanan pada saat pelaksanaan malam rama tamah dalam rangka launching Pro Sehat di Kab. Malinau.</p>
			<p>Sambutan Bupati Malinau dalam acara kegiatan launching Pro Sehat di Kab. Malinau</p>

			Pelaksanaan kegiatan launching Pro Sehat bersama Gubernur Kalimantan Utara dengan Bupati Malinau di Kab. Malinau.
	Pada saat pemberian bantuan oleh Gubernur Kalimantan Utara di Kec. Sekatak Buji		Foto bersama Gubernur Kalimantan Utara beserta rombongan dalam rangka pemberian bantuan di Kec. Sekatak Buji.
			Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara pada saat kunjungan Gubernur Kalimantan Utara di Kec. Sekatak Buji.

	<p>Kegiatan Tim Pokja kegiatan saber pungli di Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur</p>		<p>Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara dengan Tim Pokja Saber Pungli di Kota Balikpapan.</p>
	<p>Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Prov. Kalimantan Utara.</p>		<p>Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara beserta peserta sosialisasi hukum.</p>
	<p>Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tax Amesty di Kota Tarakan</p>		<p>Foto Kasat Pol PP Prov. Kalimantan Utara pada saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Tax Amesty di Kota Tarakan.</p>

	<p>Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 April 2017 di Kota Tarakan.</p>		<p>Pada saat sesi diskusi yang di pandu oleh Gubernur Kalimantan Utara dengan narasumber Menteri Bappenas</p>
			<p>Pada saat diskusi pada saat Musrenbang RKPD pada tanggal 5 – 6 April 2017.</p>
			<p>Pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD Prov. Kalimantan Utara Tahun 2017.</p>





	<p>Pelaksanaan Latihan Integrasi Bersama Taruna Wreda (Latsitarda)</p>		<p>Penyambutan kedatangan anggota Latsitarda oleh Kasat Pol PP Prov. Kalimantan Utara di Tarakan.</p>
			<p>Foto bersama Kasatp Pol PP dengan undangan pada saat pelaksanaan Latsitarda.</p>
	<p>Peringatan HUT Satpol PP yang dilaksanakan di NTT</p>		<p>Foto bersama Kasat Pol PP, Sekretaris, Kabid Tratibum Prov. Kalimantan Utara dengan Menteri Dalam Negeri pada HUT Satpol PP di NTT.</p>

			Foto bersama Kasat Pol PP, Sekretaris, Kabid Trantibum pada saat pelaksanaan HUT Satpol PP di NTT.
			Foto bersama Kasat Pol PP Prov. Kalimantan Utara dengan seluruh Kasat Pol PP seluruh Indonesia dalam kegiatan HUT Satpol PP di NTT.
	Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Prov. Kalimantan Utara yang ke-4 dan HUT Satpol PP		Pelaksanaan upacara pada saat HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP

			Pengamanan HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP oleh anggota Satpol PP Prov. Kaltara
			Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dengan penerjun payung dalam HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP
			Foto bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dengan penerjun payung dalam HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP

			Foto bersama Satpol PP Prov. Kalimantan Utara dalam HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP
			Foto bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Asisten 1 Prov. Kaltara dan anggota Satpol PP Prov. Kaltara dalam kegiatan HUT Prov. Kalimantan Utara ke – 4 dan HUT Satpol PP
	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se – Kalimantan Utara pada tanggal 15 Mei 2017.		Foto bersama para undangan kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se – Kalimantan Utara




			<p>Rapat Koordinasi Satpol PP se-Kalimantan Utara dilaksanakan untuk mencari permasalahan dan solusi terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP se-Kalimantan Utara</p>
			<p>Sambutan Kepala Dirjan Satpol PP Kementerian Dalam Negeri pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Satpol PP se – Kalimantan Utara</p>
			<p>Sambutan Gubernur Kalimantan Utara yang di wakilkkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara dalam Rapat Koordinasi Satpol PP se Kalimantan Utara.</p>

			<p>Penyampaian laporan kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se Kalimantan Utara oleh Sekretaris Satpol PP Prov. Kalimantan Utara.</p>
			<p>Penyampaian materi oleh perwakilan Polres Bulungan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se Kalimantan Utara.</p>
			<p>Penyampaian materi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Utara dalam kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se Kalimantan Utara.</p>




			<p>Penyampaian materi oleh perwakilan dari Kenjaksaan Negeri Tanjung Selor dalam kegiatan Rapat Koordinasi Satpol PP se Kalimantan Utara.</p>
	<p>Pelaksanaan launching STQ Nasional ke 26 yang akan dilaksanakan di Kalimantan Utara</p>		<p>Launching STQ Nasional ke 26 yang akan dilaksanakan di Kalimantan Utara</p>
			<p>Satpol PP Prov. Kalimantan Utara terpilih menjadi salah satu LO (Liaison Offiecer) dalam pelaksanaan STQ Nasional ke 26.</p>


	<p>Kegiatan Tanggap Bencana yang dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2017</p>		<p>Pemantauan debit air yang dilaksanakan oleh Satpol PP Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 23 Mei 2017</p>
			<p>Meningkatnya debit air banjir yang terjadi disekitar Masjid Agung Tanjung Selor dari hasil pemantauan Satpol PP Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 23 Mei 2017.</p>
	<p>Rapat Koordinasi terkait bencana banjir yang terjadi di Wilayah Tanjung Selor</p>		<p>Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Polres Bulungan terkait penanganan bencana banjir di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 24 Mei 2017</p>

			<p>Rapat koordinasi ini dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP Prov. Kaltara 2. Satpol PP Kab. Bulungan 3. Dinas Sosial Kab. Bulungan 4. Tagana Kab. Bulungan 5. PLN Wilayah Tanjung Selor 6. BMKG Tanjung Selor 7. Polres Bulungan 8. Kodim Bulungan
	<p>Peninjauan bencana banjir oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 24 Mei 2017</p>		<p>Wakil Gubernur Kalimantan Utara meninjau bencana banjir di wilayah Tanjung Selor pada tanggal 24 Mei 2017.</p>
			<p>Wakil Gubernur Kalimantan Utara beserta rombongan mengelilingi wilayah yang berdampak banjir.</p>

	<p>Evakuasi warga berdampak bencana banjir di wilayah Tanjung Selor pada tanggal 24 Mei 2017.</p>		<p>Evakuasi warga yang berdampak banjir yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 24 Mei 2017.</p>
			<p>Evakuasi warga oleh anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara pada tanggal 24 Mei 2017.</p>
	<p>Pemantauan kembali debit air banjir pada malam hari di wilayah Tanjung Selor pada tanggal 24 Mei 2017.</p>		<p>Pemantauan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 pada malam hari untuk melihat debit air di wilayah Tanjung Selor.</p>

			Pemantauan debit air ini dilaksanakan disekitar pinggiran sungai kayan untuk melihat debit air banjir di wilayah Tanjung Selor.
	Evakuasi warga yang berdampak banjir pada tanggal 24 Mei 2017 pada malam hari		Evakuasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 pada malam hari.
			Evakuasi ini dilaksanakan karena semakin tingginya debit air banjir yang terjadi di wilayah Tanjung Selor pada tanggal 24 Mei 2017.

	<p>Pelaksanaan evakuasi warga pada tanggal 25 Mei 2017</p>		<p>Evakuasi ini dilaksanakan oleh anggota Satpol PP Prov. Kalimantan Utara karena debit air banjir meningkat.</p>
			<p>Evakuasi ini dilaksanakan karena debit air banjir tidak kunjung turun sehingga perlu dilaksananya evakuasi warga.</p>
	<p>Evakuasi warga yang berdampak banjir di Wilayah Tanjung Selor</p>		<p>Tempat evakuasi warga yang terkena dampak banjir di wilayah Tanjung Selor.</p>

			Para warga yang dievakuasi karena terkena dampak banjir di Wilayah Tanjung Selor.
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Sambutan Gubernur Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Permendagri No. 84 Tahun 2014 yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara.
			Pada saat Staf Ahli Gubernur Kalimantan Utara membawakan materi mengenai daerah perbatasan.

		Penyampaian materi oleh Direktur Satpol PP Kementerian Dalam Negeri
--	--	---